

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ekowati, Mas Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Moleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muhammad. 1983. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

Jurnal/ Skripsi:

- Andesko, Riki. 2018. *Efektifitas PPID Kabupaten Tanah Datar dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Bakhtiar, Rahmat. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Serang: Universitas Ageng Tirtayasa.

- Febrianingsih, Nunuk. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal : Rechts Vinding Online*.
- Fitria, Ulfah. 2017. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bukittinggi*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Persada, Adlin.. 2018. *Implementasi Keterbukaan Infrormasi Publik di Bappeda Kota Padang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Prabowo, Rizki Dwi. 2016. *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.
- Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 480/480/WAKO-PP/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Website:

ppid.padangpanjang.go.id

Padangpanjang.go.id

Perpamsi.or.id/berita/view/2016/09/09/275/pdam-padang-panjang-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2016.

ppid.padangpariamankab.go.id/articles/view/struktur/-organisasi-ppid-padang-pariaman

www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz

http://ww.rri.co.id/padang/post/berita/210954/daerah/miris_respon_badan_publik_di_sumbar_terhadap_pemeringkatan_keterbukaan_informasi_sangat_rendah.html.

<https://www.tribunsumbar.com/fadly-amran-keterbukaan-penting-wujudkan-visi-antikkn>.

